



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA



LAPORAN KINERJA **KPKNL** Jakarta V

2
0
2
1



KPKNL JAKARTA V



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja.

Berpedoman dengan peraturan tersebut maka KPKNL Jakarta V telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Laporan capaian kinerja tahun 2021 KPKNL Jakarta V menyajikan hasil pencapaian terhadap 10 (sepuluh) sasaran strategis *Kemenkeu Three* KPKNL dengan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama, yang berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2021 sebesar 110,28% beserta hasil analisa atas capaian tersebut.

Dalam laporan ini juga disajikan beberapa capaian/penghargaan yang berhasil diperoleh oleh KPKNL Jakarta V selama Tahun 2021 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta V, baik dari Kementerian Keuangan, lembaga sertifikasi eksternal, maupun dari Kementerian/Lembaga lain.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2021 ini disusun dengan harapan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, sekaligus merupakan pertanggungjawaban atas upaya pencapaian tujuan/sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada KPKNL Jakarta V.

Jakarta , 27 Januari 2022

Kepala Kantor



Adriana Viveriyanti

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
 BAB I	 PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
B. Peran Strategi KPKNL Jakarta V	6
C. Sistematika Laporan	10
 BAB II	 RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategis	11
B. Penetapan Kinerja	12
 BAB III	 AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	28
 BAB IV	 CAPAIAN LAIN
BAB V	PENUTUP
	32

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pertanggungjawaban KPKNL Jakarta V dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui Laporan Kinerja Tahun 2021 yang memuat pencapaian sasaran/tujuan strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Visi DJKN yaitu "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang, KPKNL Jakarta V menyelenggarakan fungsi :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;

7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
15. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja;
16. Melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
17. Penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, (legal opinion), serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat

Dalam perencanaan kegiatan, Kementerian Keuangan telah menetapkan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) untuk melengkapi Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta V Tahun 2021 terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan Slogan Berupa Lima "Lugas,Ikhlas, Melayani Anda" , seluruh pegawai KPKNL Jakarta V bertekad untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dengan penuh Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan sesuai Nilai - Nilai Kementerian Keuangan.

B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC), rata-rata tingkat pencapaian kinerja terhadap 19 (sembilan belas) IKU yang merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) sasaran strategis Kemenkeu Three KPKNL Jakarta V tahun 2021 adalah sebesar 110,28% dengan rincian sebagai berikut :

NO.	IKU	TARGET	REALISASI	INDEKS (MAKS 120%)
Stakeholder Perspective (25%)				28,44%
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			112,89%
	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	73,16%	118,00%
	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%	138,26%	120,00%
	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%	101,79%	101,79%
Customer Perspective (15%)				16,19%
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			115,61%
	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88,5	97,37	110,02%
	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	140,43%	120,00%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien			100,21%
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,75	4,76	100,21%
Internal Process Perspective (15%)				31,60%
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif			104,09%
	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%	91,89%	91,89%
	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	104,93%	104,93%
	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	0,41%	120,00%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			109,53%
	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	101,91%	101,91%
	Persentase Produktivitas Lelang	35%	37,63%	107,51%

	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	100,00%	108,70%
	Deviasi Data PNPB Fungsional DIKN	12,5%	0,07%	120,00%
6	Edukasi yang Efektif			100,93%
	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91	91,84	100,93%
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif			106,80%
	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	90,78%	106,80%
Learning & Growth Perspective (30%)				34,05%
8	SDM yang Kompeten			120,00%
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%
9	Organisasi yang Fit For Purpose			120,00%
	Nilai Remy Pengelolaan Kinerja	75	95,09	120,00%
	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pelabar Administrator	80	97,90	120,00%
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal			100,51%
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,99%	100,51%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				110,28%

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang telah diubah dengan PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan Pasal 30 PMK Nomor 170/PMK.01/2012, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KPKNL menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;

n. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

KPKNL dipimpin oleh Kepala kantor yang merupakan pejabat eselon 3, dan terdiri dari 7 (tujuh) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Pelayanan Penilaian;
- d. Seksi Piutang Negara;
- e. Seksi Pelayanan Lelang;
- f. Seksi Hukum dan Informasi;
- g. Seksi Kepatuhan Internal
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Tahun 2021 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta V dilaksanakan oleh 44 (empat puluh empat) orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1
SDM Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki – Laki	Perempuan	Total Orang
1.	I	0	0	0
2.	II	8	2	10
3.	III	20	9	29
4.	IV	4	1	5
TOTAL		32	12	44

Tabel 2
SDM Berdasarkan Usia

Kelompok Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18 – 30	-	9	-	-	9
31 – 40	-	1	17	-	18
41 – 50	-	-	10	4	14
Di atas 50	-	-	2	1	3
Total	-	10	29	5	44

Tabel 3
SDM Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Golongan				Total Pegawai
		I	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-
3.	SLTA/DI/DII	-	2	5	-	7
4.	DIII	-	8	4	-	12
5.	DIV/Sarjana	-	-	19	-	19
6.	Pasca Sarjana/Master	-	-	1	5	6
7.	Doktor/S3	-	-	-	-	-
TOTAL		-	10	29	5	44

Tabel 4
SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Orang
1.	Pelelang Ahli Madya	1
2.	Pelelang Ahli Muda	4
3.	Pelelang Ahli Pertama	2
4.	Penilai Pemerintah Ahli Muda	1
5.	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	2
6.	Penata Lakasana Barang Terampil	1
7.	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
TOTAL		12

9	Rahmat adi nugroho	Penilai Pemerintah Ahli Pertama
---	--------------------	---------------------------------

10.	Imam sartono hadi wijaya	Penilai Pemeritah Ahli Pertama
11.	Teddy indramawan	Penata Lakasana Barang Terampil
12.	Abdul rajab nasution	Pranata Keuangan APBN Terampil

B. PERAN STRATEGIS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V

Sebagai organisasi yang memiliki tugas memberikan pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang, KPKNL Jakarta V memiliki peran strategis sebagai berikut :

a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Jakarta V turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara yang difokuskan pada upaya pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu, KPKNL Jakarta V selaku *asset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam rangka peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

b. Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara. Proses penilaian dilakukan setelah adanya analisis oleh pengelola barang yang bertujuan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dan nilai sewa wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara.

Di sisi lain, penilaian dalam rangka memperoleh nilai pasar dan nilai likuidasi dilakukan terhadap objek penilaian yang merupakan barang jaminan/harta kekayaan lain mili debitur, dalam proses pengurusan piutang negara oleh KPKNL Jakarta V selaku PUPN.

Hasil penilaian barang milik negara tersebut akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara, dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

c. **Pengurusan Piutang Negara**

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan – badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah.

Selain itu, juga terdapat penyerahan piutang negara dari sejumlah Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang permasalahannya sangat kompleks. Namun sejalan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, dinyatakan bahwa Piutang BUMN bukan sebagai Piutang Negara, maka KPKNL Jakarta V sejak tanggal tersebut tidak melakukan pengurusan atas Piutang BUMN.

Dengan terbentuknya Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih BLBI (Satgas BLBI) Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti, Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia jo. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2021

tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

d. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu peraturan/putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien, dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Jakarta V diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "*mindset*" masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

e. Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, rencana kerja, rencana strategik, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Seksi Hukum dan Informasi bertugas melakukan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*) serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, menyusun Laporan kuntabilitas Kinerja (LAKIN), menatausahakan hasil pengurusan piutang negara dan lelang. Selain itu, terdapat tugas berupa pengawasan terhadap implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan kehumasan.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV Capaian Lain

BAB V Penutup

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dimaksud, selama tahun 2021 KPKNL Jakarta V telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II Laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja KPKNL Jakarta V di tahun yang akan datang.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis.

Dalam mengemban tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta V mempunyai visi "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Untuk merealisasikan visi tersebut, KPKNL Jakarta V mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Jakarta V sebagaimana ditetapkan dalam Renstra KPKNL Jakarta V Tahun 2020-2024 adalah "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

Pada dasarnya sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik, dalam jangka pendek dan terukur. Adapun sasaran yang hendak dicapai KPKNL Jakarta V untuk Tahun Anggaran 2021 meliputi :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;

2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien;
4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif;
5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
6. Edukasi yang Efektif;
7. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif;
8. SDM yang Kompeten;
9. Organisasi yang Fit For Purpose;
10. Pengelolaan Keuangan yang Optimal;

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta V melaksanakan program "Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang (wilayah kerja KPKNL)". Program tersebut merupakan program yang ditetapkan dalam Renstra KPKNL Jakarta V Tahun 2020 - 2024.

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dalam hal ini KPKNL Jakarta V.

KPKNL Jakarta V memiliki beban tugas tersendiri yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2017 tentang Pembagian Tugas Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pedoman yang wajib untuk diikuti dan dilaksanakan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Jakarta V harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. *Balance Score Card* (BSC) merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Dalam hal ini, peta strategi Kemenkeu Three KPKNL Jakarta V tahun 2021 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Keempat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 10 Sasaran Strategis (SS) dengan peta strategis sebagai berikut:

Visi KPKNL Jakarta V

Mengelola Kekayaan Negara Secara Profesional dan Akuntabel Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan KPKNL



Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, KPKNL Jakarta V telah membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai pada satu waktu tertentu. Penetapan Kinerja KPKNL Jakarta V tahun 2021 sesuai dengan peta strategis Kemenkeu Three Tahun 2021 terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 6
Penetapan Kinerja Berdasarkan Peta Strategis Tahun 2021

NO.	IKU	TARGET
Stakeholder Perspective		
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	
	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%
Customer Perspective		
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	
	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88,5
	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,75
Internal Process Perspective		
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	
	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	
	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
	Persentase Produktivitas Lelang	35%
	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%

6	Edukasi yang Efektif	
	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	
	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
Learning & Growth Perspective		
8	SDM yang Kompeten	
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9	Organisasi yang Fit For Purpose	
	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Berdasarkan tabel diatas maka untuk selanjutnya pembahasan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan dalam Bab III mengacu pada Capaian IKU, Evaluasi dan Analisis Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2021 terhadap 19 (Sembilan belas) IKU KPKNL Jakarta V Tahun 2021, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) IKU memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja $\geq$ 100% (indikator warna hijau);
2. 1 (satu) IKU memperoleh hasil capaian kurang <100% s.d.80% (indikator warna kuning);

Adapun rincian tabel terhadap capaian kinerja atas 19 (Sembilan belas) IKU dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Capaian Kinerja Tahun 2021

NO.	IKU	TARGET	REALISASI	INDEKS (MAKS 120%)
Stakeholder Perspective (25%)				28,44%
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			112,89%
	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	73,16%	118,00%
	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%	138,26%	120,00%
	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%	101,79%	101,79%
Customer Perspective (15%)				16,19%
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			115,61%
	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88,5	97,37	110,02%
	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	140,43%	120,00%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien			100,21%
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,75	4,76	100,21%

Internal Process Perspective (15%)				31,60%
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif			104,09%
	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%	91,89%	91,89%
	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	104,93%	104,93%
	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	0,41%	120,00%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			109,53%
	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	101,91%	101,91%
	Persentase Produktivitas Lelang	35%	37,63%	107,51%
	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	100,00%	108,70%
	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%	0,07%	120,00%
6	Edukasi yang Efektif			100,93%
	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91	91,84	100,93%
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif			106,80%
	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	90,78%	106,80%
Learning & Growth Perspective (30%)				34,05%
8	SDM yang Kompeten			120,00%
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%
9	Organisasi yang Fit For Purpose			120,00%
	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75	95,09	120,00%
	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	97,90	120,00%
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal			100,51%
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,99%	100,51%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				110,28%

Pada tahun 2020, KPKNL Jakarta V memiliki 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) IKU memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja $\geq 100\%$ (indikator warna hijau);
2. 3 (tiga) IKU memperoleh hasil capaian kurang $<100\%$ s.d.80% (indikator warna kuning);
3. 3 (tiga) IKU memperoleh hasil kurang dari 80% (indikator warna merah), yaitu Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016) mencapai 0,13% dari target 3%, Persentase efektivitas penyelesaian BKPN yang mencapai 33,69% dari target 100% dan Persentase produktivitas lelang mencapai 27% dari target 34%.

dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 8
Capaian Kinerja Tahun 2020

NO.	IKU	TARGET	REALISASI	INDEKS (MAKS 120%)
Stakeholder/Customer Perspective				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal			
	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	92,40%	92,40%
	Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016)	3%	0,13%	4,23%
	Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	100%	100%	100%
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			
	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,74	4,75	100,21%
3	Pengelolaan lelang yang optimal			
	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100%	97,69%	97,69%
Internal Process Perspective				
4	Manajemen Pelayanan yang Berkualitas			
	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	88	91,16	103,59%
5	Tata kelola kekayaan negara yang efektif			
	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	100%	100%
	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	33,69%	33,69%
	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	100%	197,89%	120%
	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN	100%	100%	100%

	(portofolio aset)			
6	Penilaian yang berkualitas			
	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	4,29%	120%
7	Tata kelola lelang yang efektif			
	Persentase produktivitas lelang	34%	27%	79,42%
	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	90%	100%	111,11%
8	Edukasi yang efektif			
	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90	93,60	104%
9	Pengawasan dan pengendalian yang efektif			
	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%	84,03%	105,04%
	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	100%	93,06%	93,06%
	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang diitindaklanjuti	90%	100%	111,11%
Learning & Growth Perspective				
10	SDM yang kompeten			
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%
11	Organisasi yang <i>Fit to Purpose</i>			
	Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	70	98,80	120%
	indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80	93,20	116,50%
12	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal			
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95,55%	100,58%
Nilai Kerja Organisasi (NKO)				99,39%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 maka terjadi Peningkatan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2021. Dalam hal ini, jika pada tahun 2020 NKO tercapai sebesar 99,39 % maka pada tahun 2021 NKO mencapai 110,28%.

a. Analisis Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 10 (sepuluh) Sasaran Strategis Kemenkeu Three Jakarta V Tahun 2021 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* sebagai berikut:

Pengelolaan kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Pada tahun 2021 capaian terhadap Indeks Ketepatan

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

1) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK.

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. pada tahun 2021 capaian terhadap Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Terealisasi sebesar 73,16% dari Target 62,00% sehingga mencapai Nilai Indeks 118,00%

2) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. pada tahun 2021 capaian terhadap Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang terealisasi sebesar 138,26% dari target sebesar 100,00% sehingga mencapai Nilai Indeks 120,00%.

3) Persentase Penurunan outstanding piutang negara

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Pada tahun 2021 capaian terhadap Persentase Penurunan outstanding piutang negara terealisasi sebesar 101,79% dari target sebesar 100%.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

1) Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Pada tahun 2021 capaian terhadap Indeks Ketepatan

waktu layanan kekayaan negara dan Lelang terealisasi sebesar 97,37 dari target sebesar 88,50 dengan nilai indeks sebesar 110,02%.

2) Persentase realisasi pokok lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas seluruh pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Lelang yang dilaksanakan Pegadaian dalam satu tahun. Pada tahun 2021 capaian Persentase realisasi pokok lelang terealisasi sebesar 140,43% dari target 100% dengan nilai indeks sebesar 120,00%.

3. **Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien**

Indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (quick win). Survei dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan. Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar 4,76 dari target sebesar 4,75 dengan nilai indeks sebesar 100,21%.

4. **Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif**

1) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak. Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar 91,89% dari target sebesar 100%.

2) Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang

saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar 104,93% dari target sebesar 100%.

3) Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar 0,41% dari target sebesar 22% dengan nilai indeks sebesar 120,00%.

5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

1) Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas
2. BKPN Penarikan
3. BKPN dikembalikan, dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar 101,91% dari target sebesar 100%.

2) Persentase produktivitas lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa besar intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar 37,63% dari target sebesar 35% dengan nilai indeks sebesar 107,51%.

Lelang yang batal tidak masuk dalam perhitungan IKU.

3) Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka). Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi e-auction meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account). Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 92% dengan nilai indeks sebesar 108,70%.

4) Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

PNBPN Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I dengan MAP 425782, dan Bea Lelang Pegadaian dengan MAP 425784.

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/SIMPONI pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- 2) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/SIMPONI pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara

kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar 0,07% dari target sebesar 12,5% dengan nilai indeks sebesar 120,00%.

6. Edukasi yang Efektif

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar 91,84 dari target sebesar 91 dengan nilai indeks sebesar 100,93%.

7. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar 90,78% dari target sebesar 85% dengan nilai indeks sebesar 106,80%.

8. SDM yang Kompeten

Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar 120% dari target sebesar 100%

9. Organisasi yang fit for purpose

1) Nilai hasil review pengelolaan kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem

penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi. Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar 95,09 dari target sebesar 75 dengan nilai indeks sebesar 120%.

2) Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan. Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar 97,90 dari target sebesar 80 dengan nilai indeks sebesar 120%.

10. Pengelolaan keuangan yang optimal

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),

Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Realisasi yang telah tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar 95,99% dari target sebesar 95,5% dengan nilai indeks sebesar 100,51%.

b. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilakukan analisis terhadap faktor penyebab adanya keberhasilan/peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang harus dilakukan, khususnya yang terkait pencapaian kinerja pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, sebagai berikut :

Tabel 9
Evaluasi Kinerja Dalam Pengelolaan Kekayaan Negara

No.	Kendala yang dialami	Upaya yang dilakukan
1.	Kurangnya dokumen pendukung bukti kepemilikan tanah satker yang menjadi objek sertifikasi yang dipersyaratkan untuk dilengkapi dalam rangka penerbitan sertipikat tanah	1. Koordinasi dengan Pihak terkait (Kanwil, kanpus dan Kantor Pertanahan)
2.	Terdapat perbedaan luas antara data luasan bidang tanah di SIMAN dengan hasil pengukuran Kantor Pertanahan.	2. Koordinasi dengan Satker objek sertifikasi Tahun 2021 terkait pendaftaran sertifikasi ke Kantor Pertanahan 3. Menyampaikan revisi target atas tanah yang tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan permasalahan pihak ketiga dan permasalahan hukum lainnya
3.	Satker tidak melakukan pelaporan tindaklanjut persetujuan pemindah tanganan dan pemanfaatan BMN	Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan Satker baik tertulis maupun lisan
4.	Kesadaran Satker dalam menindaklanjuti Surat Persetujuan masih tergolong rendah	
5	Banyaknya permohonan dari waktu ke waktu pada waktu yang bersamaan	Mendistribusikan pekerjaan kepada staf dengan memperhatikan SOP

Tabel 10

Evaluasi Kinerja dalam Pelayanan Lelang

No.	Permasalahan	Upaya yang dilakukan
1.	Pengguna layanan menginginkan layanan cepat dan prima	Memberikan pelayanan terbaik dengan memperhatikan peraturan SOP
2.	Sebagian lelang hak tanggungan, Harta Pailit dan Pengadilan tidak ada penawaran karena tidak marketabel, nilai limit tinggi dan kurang peminat	Memfokuskan lelang BMN dan sukarela sebagai pendongkrak produktifitas
3.	Masih adanya keraguan pembeli lelang untuk membeli melalui lelang	
4.	Pengguna jasa enggan mengisi kuesioner	Tetap memberikan bimbingan baik melalui surat maupun tatap muka maupun media lain.

Tabel 11

Evaluasi Kinerja Dalam Pelayanan Penilaian

No	Kendala yang dialami	Upaya yang dilakukan
1.	Permohonan nilai dari Satuan Kerja tidak normal/terlalu tinggi	1. Melakukan penilaian dengan dasar aturan dan SOP penilaian 2. Melakukan penilaian dengan melihat besar usulan permohonan 3. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja apabila ada nilai usulan yang tidak normal

Tabel 12

Evaluasi Kinerja Dalam Pengurusan Piutang Negara

No.	Kendala yang Dialami	Upaya yang Dilakukan
1.	BKPN tidak memiliki barang jaminan	koordinasi dengan penyerah piutang terkait dengan pengurusan piutang negara dengan nilai dibawah 8 juta yang dilakukan oleh Satker/KL
2.	BKPN memiliki usia yang sudah lama	koordinasi dengan penyerah piutang terkait dengan rencana pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian lapangan
3.	BKPN memiliki permasalahan hukum	koordinasi dengan penyerah piutang terkait dengan permasalahan hukum
4.	Barang Jaminan tidak marketable	melakukan inventarisasi dan verifikasi BKPN yang potensial diselesaikan
5.	Debitur tidak diketahui keberadaannya	melakukan panggilan terhadap debitur yang memiliki jumlah utang besar
6.	Pengguna jasa tidak membaca kuesioner dengan cermat	Memberikan penjelasan kepada stakeholder sesuai dengan nilai - nilai Kementerian Keuangan

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa hanya terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasinya belum tercapai 100% atau belum sesuai target yang ditentukan, yaitu:

1. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan indikator kuning dari (Target 100%, Realisasi 91,89%)

Bahwa terhadap kendala yang dialami dan upaya yang akan dilakukan dalam Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara, Penilaian dan Pelayanan Lelang telah dijelaskan dan diuraikan dalam tabel diatas terutama terhadap IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan. Sulitnya tercapainya target IKU tersebut diakibatkan oleh Kurangnya dokumen kepemilikan tanah satker yang menjadi objek sertifikasi yang dipersyaratkan untuk dilengkapi dalam rangka penerbitan sertipikat tanah serta Terdapat perbedaan luas antara data luasan bidang tanah di SIMAN dengan hasil pengukuran Kantor Pertanahan.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk capaian kinerja tahun 2021, perhitungan capaian IKU tahun 2021 yaitu persentase kualitas pelaksanaan anggaran terbagi dalam 4 (empat) komponen yang terdiri dari realisasi penyerapan anggaran, realisasi output, realisasi efisiensi dan konsistensi atas pelaksanaan rencana penarikan anggaran. Perhitungan capaian kinerja yang terbagi dalam empat komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 13
Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Jakarta V
Bulan Desember Tahun Anggaran 2021

URAIAN	PAGU AKHIR (Rp)	REALISASI (Rp)	% PENYERAPAN ANGGARAN
		s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Ini
(1)	(2)	(4)	(6)
Pagu Anggaran	2.024.188.000	1.988.668.934	98,25%

Tabel 14
Realisasi Output 2021 KPKNL Jakarta V
Bulan Desember Tahun Anggaran 2021

NO	KELUARAN RIIL	VOLUME	Realisasi	% CAPAIAN KELUARAN RIIL
				s.d. Bulan Ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
1	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	280	446	159%
2	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	570	962	169%
3	Risalah Lelang	630	683	108%
4	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	37	34	91,89%
5	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	360	362	106%
6	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1	1	100%
7	Rekomendasi Hasil Penilaian	1	1	100%
8	Pengelolaan Aset BUN	92	100	109%
9	Advokasi Hukum	15	18	120%
10	Operasionalisasi Kantor	12	12	100%
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115	115	100%
12	Peralatan Fasilitas Perkantoran	3	3	100%
13	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	5	100%

Tabel 15
Konsistensi Rencana Penarikan Dana
KPKNL Jakarta V
Bulan Desember Tahun 2021

BULAN	RPD (Belanja Barang dan Belanja Modal)	REALISASI PENYERAPAN BULAN INI (Belanja Barang dan Belanja Modal)	RPD - REALISASI (Selisih)
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	Rp1.046.938	Rp1.046.940	Rp2
Februari	Rp143.741.351	Rp143.741.352	Rp1
Maret	Rp205.897.112	Rp205.897.112	-
April	Rp201.009.926	Rp201.009.926	-
Mei	Rp168.811.689	Rp168.811.689	-
Juni	Rp227.655.340	Rp227.655.340	-
Juli	Rp122.753.412	Rp122.753.412	-
Agustus	Rp146.163.050	Rp146.163.050	-
September	Rp212.442.669	Rp212.442.669	-
Oktober	Rp164.251.229	Rp164.251.230	Rp1
November	Rp130.000.000	Rp133.887.746	Rp3.887.746
Desember	Rp300.415.284	Rp261.008.468	Rp 39.406.816

Dari keseluruhan anggaran yang tersedia pada DIPA KPKNL Jakarta V pada tahun 2021 yang mencapai nilai Rp.2.024.188.000,00 telah terealisasi sebesar

Rp.1.988.668.934,00 atau 98,25%. Terhadap Kode dan Nama Kegiatan, dapat dirinci realisasi anggaran pada tabel berikut:

Tabel 16
Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Uraian	Pagu Dalam DIPA (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persen (%)
1.	4700 Legislasi dan Litigasi	39.658.000	39.214.000	98,88%
2.	4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.418.428.000	1.413.553.526	99,66%
3.	4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	900.000	900.000	100%
4.	4798 Pengelolaan Aset	565.202.000	535.001.408	94,66%
Jumlah		2.024.188.000	1.988.668.934	98,25%

BAB IV

CAPAIAN LAIN

1. Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM)

Pada Tahun 2021 KPKNL Jakarta V berhasil mempertahankan predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK WBBM) yang telah diraih pada Tahun 2013. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta), Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ketika melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KPKNL Jakarta V sebagai kantor yang sudah berpredikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, namun secara umum predikat WBK-WBBM masih layak disandang KPKNL Jakarta V.

2. Sertifikasi ISO 9001:2015

Untuk menjaga mutu layanan kepada mitra kerja, khususnya dalam pelayanan lelang, KPKNL Jakarta V telah berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2015 pada tahun 2017 dan berhasil dipertahankan pada tahun 2021. Sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan di KPKNL Jakarta V telah memenuhi standar layanan sesuai standar Badan ISO Internasional. Meskipun belum semua layanan disertifikatkan, namun sertifikasi ISO 9001:2015 untuk layanan lelang tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang lain agar dapat memenuhi standar layanan yang sama.

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta V tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta V tahun 2021 memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/29/M.PAN/5/2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selain itu Laporan ini juga memuat capaian lain yang berhasil diraih oleh KPKNL Jakarta V.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja KPKNL Jakarta V ada yang berhasil melampaui target, namun ada pula yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang dirinci menjadi 19 (Sembilan belas) IKU yang menjadi tanggung jawab KPKNL Jakarta V, terdapat 18 (delapan belas) IKU yang mencapai target dan 1 (satu) IKU yang belum dapat memenuhi target yang ditentukan.

Terhadap 1 (satu) IKU yang realisasinya belum tercapai 100%, yaitu untuk IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan dengan indikator kuning dari (Target 100%, Realisasi 91,89%), langkah yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :

Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan dengan indikator

- Koordinasi dengan Satker dan Kantor Pertanahan secara rutin
- Melakukan mapping atas tanah yg menjadi target di tahun 2022
- Optimalkan penyelesaian sampai dengan perpanjangan waktu s.d. 31 Januari 2022

**MATRIKS EVALUASI INDIKATOR, PENETAPAN TARGET, DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2021
KPKNL JAKARTA V**

Indikator Kinerja pada Rencana Strategis	Target Kinerja pada Rencana Strategis	Indikator Kinerja pada Kontrak Kinerja	Target Kinerja pada Kontrak Kinerja	Capaian Kinerja	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	a. Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2021) b. Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2020	-70,00% (bobot 75%) -82,63% (bobot 25%)	Target Terlampaui
	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	-PNBP Pengelolaan BMN (Rp32.210.000.000) -PNBP Piutang Negara (Rp9.384.209.694) -PNBP Lelang (Rp28.993.000.000)	-PNBP Pengelolaan BMN (Rp48.272.860.888) -PNBP Piutang Negara (Rp13.596.851.377) -PNBP Lelang (Rp35.723.441.647)	Target Terlampaui
	Persentase Penurunan outstanding piutang negara	100%	Target/Realisasi (Saldo PNDs s.d 2017) (Rp1.154.193.324.101)	Target/Realisasi (Saldo PNDs s.d 2017) Rp1.174.890.177.300)	Target Terlampaui
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88,5	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang(88,5)	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang (97,37)	Target Terlampaui
	Persentase realisasi pokok lelang	100%	- Pokok Lelang Kelas I (Rp579.000.000.000) - Pokok Lelang Pegadaian (Rp135.000.000.000)	- Pokok Lelang Kelas I (Rp811.803.961.742) - Pokok Lelang Pegadaian (Rp190.842.804.200)	Target Terlampaui
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,75	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL(4,75)	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL(4,76)	Target Terlampaui
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	bidang tanah BMN yang disertifikatkan (37)	bidang tanah BMN yang disertifikatkan (34)	Target Tidak Tercapai
	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) (142)	implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) (149)	Target Terlampaui
	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	Deviasi ketergunaan hasil penilaian (22%)	Deviasi ketergunaan hasil penilaian (0,41%)	Target Terlampaui

Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	Efektivitas Penyelesaian BKPN (944)	Efektivitas Penyelesaian BKPN (962)	Target Terlampaui
	Persentase produktivitas lelang	100%	Persentase produktivitas lelang(100%)	Persentase produktivitas lelang(107,51%)	Target Terlampaui
	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction (92%)	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction (100%)	Target Terlampaui
	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%	-Deviasi Data PNBPN Lelang (10%) -Deviasi Data PNBPN Piutang Negara(15%)	-Deviasi Data PNBPN Lelang (0,14%) -Deviasi Data PNBPN Piutang Negara(0%)	Target Terlampaui
Edukasi yang efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi (91)	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi (91,84)	Target Terlampaui
Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara (85%)	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara (90,78%)	Target Terlampaui
SDM yang kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (100%)	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (120%)	Target Terlampaui
Organisasi yang fit for purpose	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75	Nilai hasil review pengelolaan kinerja (75)	Nilai hasil review pengelolaan kinerja (95,09)	Target Terlampaui
	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator (80)	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator (97,90)	Target Terlampaui
SDM yang kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (100%)	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (120%)	Target Terlampaui
Pengelolaan keuangan yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (95,5%)	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (95,99%)	Target Tercapai

Jakarta, 27 Januari 2022

Kepala Kantor,



Adriana Viveryanti